

## TUGAS AKHIR

### KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya ( A.MD)  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
kasim Riau*

Oleh:



**M FARIOI AFFAN**

**NIM: 01576105262**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

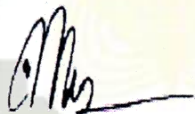
**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Nama : M FARIQI AFFAN  
Nim : 01576105262  
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul : KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Tanggal Ujian : 29 JUNI 2020

Pekanbaru, 17 desember 2020

Disetujui Oleh:

**Pembimbing**



**Dr. Mahmuzar. M. Hum**  
NIP. 19760426 200701 1016

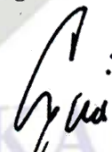
**Mengetahui**

**Dekan**



**Dr. H. Suh. Said, HM, M.Ag, MM**  
NIP. 198903 1 003

**Ketua Program Studi**



**Sahwitri Triandani, SE, M.Si NIP.**  
19820806 200604 2 002

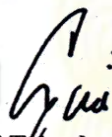
### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : M FARIQI AFFAN  
Nim : 01576105262  
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Judul : KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Tanggal Ujian : 29 JUNI 2020

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Disetujui

KETUA PENGUJI


  
Sahwitri Tandani, SE, M.Si  
NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

  
Iren Violinda Anggriani, SE, M. Si  
NIP. 1975110 6200710 2 003

PENGUJI II

  
Dr. Muhammad April, SH, M, Hum  
NIK. 130712072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**Oleh:**

**M FARIOI AFFAN**  
**NIM. 01576105262**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlangsung pada bulan Februari s/d Maret 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mendapatkan data dan informasi maka dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara dan observasi. Data primer, penulis peroleh dari responden yaitu dari pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan data skundernya penulis peroleh dari perpustakaan dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan perpajakan. Sistem pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini menggunakan 2 sistem yaitu Official Assesstment System dan Self Assessment System. Sedangkan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet disini meliputi: Pendaftaran dan Pendataan, Pelaporan, Pembayaran dan Penagihan dan, Angsuran dan Penundaan Pembayaran.

**Kata Kunci:** Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet

UIN SUSKA RIAU

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita ucapkan, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

Sholawat berangkaikan salam tak lupa pula disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu teguh hatinya di jalan Allah.

Selanjutnya, dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik moral maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kh. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rector I, II, III, yang telah memberikan waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM,. M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
3. Ibu Sahwitri Triandani,SE,M.SI Selaku ketua jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Alchudri, SE., CA., MM., CPA selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan dibidang akademis kepada penulis.

6. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan banyak ilmu kepada penulis, masukan, nasehat, motivasi dan dukungan.

7. Bapak Dr. Burhanuddin selaku kepala bidang pengelolaan pasar pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, yang telah meluangkan waktu buat penulis sehingga penulis dapat melakukan dan menyelesaikan penelitian inidengan baik.

8. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Aswandi dan Ibunda Elidar yang selalu memberikan nasehat, dukungan moril dan materil, cinta dan kasih sayang dan yang selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga penulis mampu dan semangat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

9. Kepada adik-adikku tersayang Siti Fadhilla Affan dan Siti Fazira Affan yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10. Buat teman-teman Nila Oska yang terspesial, Zakaria Achmad, Yandha Fratama elza, yang tidak bisa disebutkan yang selalu memberikan semangat serta motivasi dan kebahagiaan selama kuliah ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada rekan-rekan mahasiswa/I Administrasi Perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kerjasama, keceriaan selama menduduki bangku perkuliahan ini.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, peneliti mengucapkan terimakasih banyak. Semoga bantuannya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan setimpal. Aamiin

Apabila ada kesalahan serta kekurangan peneliti mengucapkan mohon maaf, karena peneliti hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang baik datangnya dari Allah SWT dan yang buruk datang dari penulis sendiri. Semoga Tugas Akhir (TA) ini dapat bermamfaat bagi kita semua.

Pekanbaru , 2020 Penulis,

M FARIQI AFFAN  
NIM: 01576105262

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS</b>	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>INDRAGIRI HILIR</b>	
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
Indragiri Hilir .....	12
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten	
Indragiri Hilir .....	13
2.3 Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan	
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri	
Hilir .....	15
2.4 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Indragiri Hilir .....	17



## BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori .....	23
3.1.1 Pengertian Pajak .....	23
3.1.2 Fungsi Pajak .....	24
3.1.3 Jenis Pajak .....	25
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	27
3.1.5 Pajak Sarang Burung Walet .....	28
3.1.6 Pengertian Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah .....	30
3.1.7 Tinjauan Pajak .....	32
3.1.8 Subjek dan Objek Pajak Sarang Burung Walet .....	33
3.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan Saat Terhutang Pajak Sarang Burung Walet .....	33
3.1.10 Wilayah Pemungutan, Perhitungan, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet .....	35
3.1.11 Surat Pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet .....	36
3.1.12 Pajak Dalam Pandangan Islam .....	38
3.2 Tinjauan Praktek .....	43
3.2.1 Analisis Realisasi dan Prospek Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	43
3.2.2 Kendala-kendala Yang Terjadi Dalam Penerimaan Pajak Saeang Burung Walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	48
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.1 Saran .....	52

## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet Se- Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017 – 2019 .....	7
Tabel I.2.	Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	8
Tabel III.1	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Tahun 2018 .....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.I Bagan/alur Pengawasan dan Prosedur Pelaksanaan

Pendataan Pajak Sarang Burung Walet ..... 46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan, saat ini sedang menerapkan azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya untuk memajukan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Agar daerah dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan daerah. Semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU NO 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam pasal 157 menyebutkan tentang sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Semakin besarnya peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin sedikit ketergantungan Daerah terhadap bantuan pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti: pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Dari hasil penerimaan pajak sarang burung walet oleh pemerintah digunakan untuk membiayai keperluan daerah, baik dari segi pembangunan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan daerah itu sendiri. Supaya perkembangan daerah menjadi maju, dengan ini daerah harus memiliki keunggulan yang dapat diandalkan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat adalah dari Pajak Daerah. pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di handalkan bagi daerah.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Sarang Burung Walet juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Mengingat banyak terdapatnya rumah sarang burung walet yang disediakan oleh pengusaha burung walet khususnya di Tembilahan yang dalam hal ini memiliki potensi.

Sarang Burung Walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik dihabitat alami maupun dihabitat buatan dari bahaya kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelum berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai kabupaten yang baru mekar, Pajak Sarang Burung Walet juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya yaitu dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

*Burung Walet adalah : satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga Collocalia. Pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet merupakan upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan sarang burung walet dihabitat alami maupun di habitat buatan.*

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan 3 bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya.

Pajak sarang burung walet juga menjadi andalan Pemerintah Daerah memberikan kontribusinya untuk Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) mengingat terdapat rumah-rumah pengusahaan Sarang burung walet oleh pengusaha yang di jadikan sebagai Wajib Pajak daerah.

Berdasarkan uraian diatas Penulis menfokuskan Penelitian tentang  
**“KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- a. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Indragiri Hilir?
- b. Bagaimana kontribusi pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.



## 1.4 Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bagi Mahasiswa :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet khususnya daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Mengetahui Pandangan terhadap kontribusi pajak sarang burung walet yang di terapkan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Meningkatkan kreativitas mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Penelitian ini.
- d. Membina mental dan kedisiplinan dalam dunia kerja.

Bagi Instansi Pemerintah :

- a. Sebagai sarana untuk mempereratkan hubungan yang positif antara dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk menyiapkan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai bidangnya
- c. Dengan pelaksanaan penelitian ini di tuntut sumbangsih pemikiran atau masukan dari mahasiswa untuk penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan kerja pada Dispenda.
- d. Dari hasil penelitian nanti akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet kedepan agar lebih baik lagi.
- e. Sebagai naskah akademis sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah mengenai pajak sarang burung walet.

Bagi Lembaga Pendidikan :

- a. Mempereratkan hubungan yang positif antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan lembaga pendidikan Universitas Islam Negeri Pekanbaru.
- b. Dengan penelitian ini akan menjadi sarana sosialisasi eksistensi Program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai Subjek penelitian adalah Petugas Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan Kota.
- b. Sebagai Objek penelitian ini adalah Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

#### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah petugas pemungutan pajak sarang burung walet Kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan Kota. Jumlah populasi diketahui 10 petugas pemungutan pajak sarang burung walet maka penelitian ini mengambil sampel sebanyak 10 petugas pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan teknik purposive sampling (teknik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan sample)

Adapun jumlah pengusaha burung walet yang ada di kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir ini pada tahun 2019 berjumlah 189 yang tersebar di 4 Kelurahan dan 1 Desa dan jumlah keseluruhan wajib pajak sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan berjumlah 250 wajib pajak untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah penangkaran sarang burung walet sekecamatan Tembilahan Indragiri Hilir yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel I.1. Jumlah Penangkaran Sarang Burung Walet Se-Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2017 – 2019**

No	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet Kelurahan dan Desa	2017	2018	2019
1	Kelurahan Tembilahan Kota	117	174	173
2	Kelurahan Tembilahan Hilir	-	5	10
3	Kelurahan Pekan Arba	-	1	5
4	Kelurahan Sei Perak	-	-	-
5	Kelurahan Sei Jepun	-	-	-
6	Desa Amban Sari	-	1	1
7	<b>Jumlah ....</b>	<b>117</b>	<b>181</b>	<b>189</b>

**Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir : 2019**

Pada table diatas dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang berasal dari penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap kelurahan yang ada, masing-masing memiliki penangkaran sarang burung walet. sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari sarang burung walet. dalam melaksanakan pemungutan sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan Daerah (perda) kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2008 tentang pajak Sarang burung Walet.

4. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis juga akan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian
- Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel I.2. Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	117.865.000,00	120.765.000,00	102,46
2	2016	228.595.000,00	231.465.000,00	101,25
3	2017	227.720.000,00	223.260.000,00	98,04
4	2018	253.835.000,00	77.300.000,00	30,45
5	2019	940.700.000,00	123.429.500,00	13,12

**Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Pada table diatasdapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak sarang burung walet pada tahun 2017 penerimaannya sangat bagus yang telah mencapai 102,46% dan pada tahun 2016-2019



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan sarang burung walet mengalami penurunan terus setiap tahunnya hingga mencapai 13,12% pada tahun 2019, hal ini kemungkinan terjadi akibat sistem dan prosedur pemungutan terhadap pajak sarang burung walet yang belum diketahui oleh para penangkaran burung walet tersebut diantaranya:

1. Dalam proses pembayaran pajak tersebut, pengusaha mengakui belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak. Sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet.
2. Kurangnya sosialisasi pihak Pemerintah Daerah (Pemda) tentang Peraturan Daerah ini pada pengusaha walet.

Kemudian kepemilikan tempat pengusaha sarang burung walet sebagian berdomisili diluar Kabupaten Indragiri Hilir yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang mana secara geografis, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki banyak sungai dan dikenal dengan sebutan negri seribu parit sehingga tidak mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak sarang burung walet tersebut.

- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

##### 5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :



a. Metode Wawancara

Dengan cara melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian baik secara lisan atau tertulis pada pihak yang terkait.

b. Observasi

Penulis langsung terjun ke lapangan mengamati hal-hal yang berhubungan dengan penelitian baik objek maupun subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian misalnya, Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Uraian dan jabatan, Profil Dispenda, dan lain-lain.

d. Metode Analisa

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada kemudian data tersebut dikelompokkan dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

b. Metode kuantitatif, yaitu menganalisa data yang terkumpul dengan mengedit kedalam tabel sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada bab ini terdiri dari keadaan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan Pegawai, Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Jenis-Jenis pendapatan yang dihimpun Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian pajak, Fungsi, Jenis, dan Sarang Burung Walet, Pengertian kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, subjek dan objek pajak, Dasar pengenaan dan Tarif, Masa, dan Saat Terhutang Pajak, Wilayah Pemungutan, Perhitungan, Tata Cara Perhitungan Pajak, Surat pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis memberikan saran yang sifatnya membangun.

Dalam bab ini juga penulis menyimpulkan hasil penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten/ daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan. Tembilahan resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hilir maka diperlukan perkembangan ke depan. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No. 1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja pelaksanaan dan pimpinan kantor. Pada saat Dinas Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman Fad.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah lebih kurang 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah NO. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung tersebut dibangun dari hasil penerimaan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centre tersebut diresmikan pemakainnya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. Muhammad Rusli Zainal, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragili Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten IndraGili Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragili Hilir yang sama-sama berkantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

Sekarang ini DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) ini telah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah NO. 13 Tahun 2016.

## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada dasarnya visi merupakan gambaran situasi dan karakteristik mengenai yang dicapai dalam organisasi, lembaga atau perusahaan dalam suatu waktu yang jauh kedepannya. Atau pengertian visi dapat juga diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan mengenai arah dan kemana organisasi, lembaga, perusahaan agar mampu eksis, antisipatif dan inovatif. Adapun visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragili Hilir, yaitu “ *Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang optimal sebagai salah satu andalan dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir*”.

Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pedoman Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melangkah jauh kedepan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan eksis, ansipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan, maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal sebagai salah satu andalan, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak,, Wjib Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang dapat diandalkan diantara sumber-sumber pendapatan lainnya. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Disamping visi, juga dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/ instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usahan yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.
2. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Pendapatan yang handal, serta pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah.
3. Pembinaan kepada masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi Daerah.

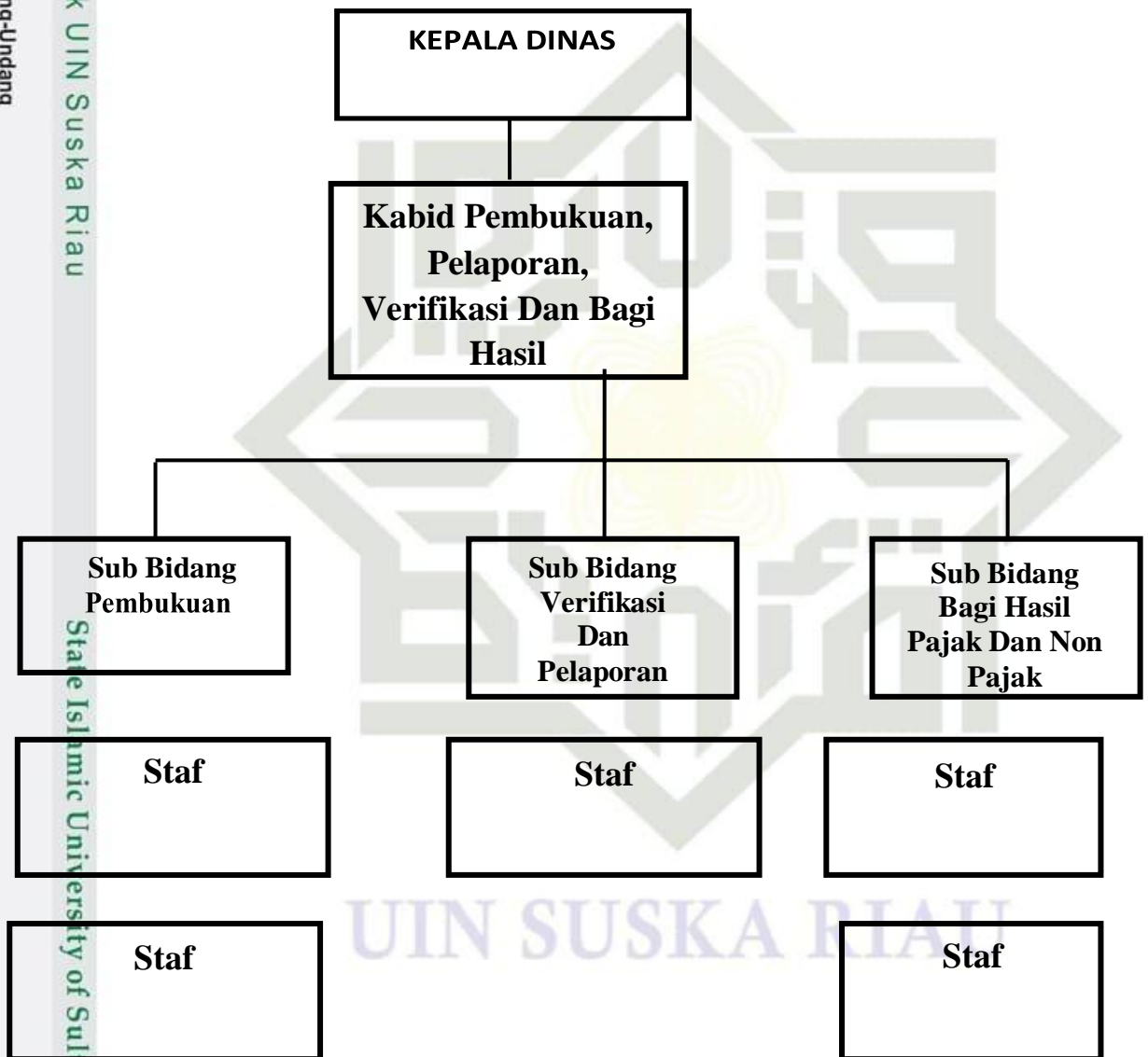
Dari misi tersebut diatas dapat dijelaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Penapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan.

### **2.3 Struktur Organisasi, Uraian Jabatan, Jumlah dan Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Dalam kegiatan suatu instansi diperlukan adanya suatu struktur dan jalur koordinasi antara anggota dalam mencapai tujuan organisasi yang telah digariskan terlebih dahulu. Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efesien. Suatu struktur yang efektif adalah bila struktur organisasi tersebut memungkinkan sumbangan dari tiap-tiap individu dalam mencapai sasaran organisasi. Selain itu organisasi bukan sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi, melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang

dan tanggung jawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut: Gambar 2.1



Sumber : Badan pendapatan daerah kabupaten indragiri hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

### a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

### b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretarian lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang keuangan pendapatan.
2. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, keprotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan.
3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
4. Penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesekretariatan.

5. Koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian aparatur
7. Koordinasi penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan badan.
8. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.
9. Koordinasi penyusunan pelaporan kinerja badan yang meliputi Laporan Hasil Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, LPPD, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan.
10. Mengevaluasi tindak lanjut rapat-rapat intern
11. Koordinasi penyusunan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sekretaris lingkup urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.

2. Membagi tugas, petunjuk serta memeriksa hasil pekerjaan bawahan.
3. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
6. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
8. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
9. Mempersiapkan bahan-bahan dan mengikuti musrenbang RKPD kecamatan.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris di lingkup urusan umum dan kepegawaian. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja,program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
2. Memberi tugas dan petunjuk kepada bawahan dan memeriksa hasil pekerjaan bawahan.
3. Menginventariskan permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian.
6. Menyiapkan bahwa rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum dan kepegawaian.
7. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
8. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan umum dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian.

9. Melaksanakan pengelolaan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup urusan keuangan dan perlengkapan uraian sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Subg Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
2. Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
4. Melaksanakan asisten, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.
5. Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNS.
6. Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP – LS, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM.
7. Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan.
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan fungsinya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Memeriksa, menganalisa dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncturan yang dikelola.
10. Melaksanakan pemeriksaan dan embuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.2 Kesimpulan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor.22 Tahun 2010, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk Marga Colloce yaitu Collocalia Fuchliap Haga, Collocalia Maxina, Collocalia Esulanta dan Collocalia Linchi.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Tembilahan bisa dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan dan per 1 tahun, sedangkan Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet ini ada 2 sistem diantaranya adalah:

1. Official Assesstment System, yang mana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Dinas Pendapatan Daerah.
2. Self Assessment System, dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh wajib pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak itu sendiri.

Sedangkan prosedur pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet meliputi:

1. Pendaftaran dan Pendataan
2. Pelaporan
3. Pembayaran dan Penagihan
4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### 4.3 Saran

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu rasanya ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti, sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Dimana disini Kantor Dinas Pendapatan hendaknya mensosialisasikan lagi tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak walet. Kemudian, Dinas Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, 2010, *Pengantar Perpajakan Dan Hukum Pajak*, Ur Pers
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 2018
- Bohari. 2012, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Gusfahmi. 2011, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 07 Tahun 2008 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU